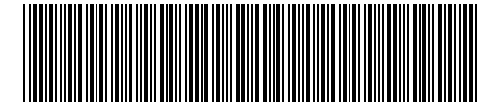




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 013.01.2.409181/2018**



DS:1982-4790-6829-8044

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 14.669.529.000 (EMPAT BELAS MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM
013.01.01.1558 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Jumlah Uang
Rp. 14.669.529.000
Rp. 14.669.529.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	14.669.529.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 14.669.529.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409181/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:1982-4790-6829-8044

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : Gunarso
Bendahara Pengeluaran : Arif Nuryono Tunggal
Pejabat Penanda Tangan SPM : R Natanegara Kartika Purnama

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		14.669.529.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		14.669.529.000
2 Program	013.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM		14.669.529.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Manajemen Organisasi Kemenkumham yang Transparan dan Akuntabel		
Indikator Kinerja Program	01	Indeks Reformasi Birokrasi	90 indeks	
	02	Indeks Integritas	3,50 indeks	
	03	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP WTP	
	04	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90 Nilai LAKIP	
Output Program	01	Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan HAM		
Indikator Output Program	01	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kementerian Hukum dan HAM	2,52 indeks	
Kegiatan	1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		14.669.529.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersedianya Jumlah layanan administrasi tata persuratan dan kearsipan Kementerian Hukum dan HAM secara tepat waktu Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham.		
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan		
	002	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu		
	003	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel		
	004	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan		
	005	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel		
	006	Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat		
Output Kegiatan	1558.951	Layanan Internal (Overhead)	1,00 Layanan	608.864.000
Output Kegiatan	1558.994	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	14.060.665.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	

Jakarta, 05 Desember 2017
Sekretaris Jenderal

ttd.

Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409181/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1982-4790-6829-8044

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409181	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	10.529.118	4.140.411	-	-	-	14.669.529		
013.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	10.529.118	4.140.411	-	-	-	14.669.529		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	10.529.118	4.140.411	-	-	-	14.669.529		
1558.951	Layanan Internal (Overhead)	-	608.864	-	-	-	608.864	04 . 51	
01	RM	-	608.864	-	-	-	608.864	030	
1558.994	Layanan Perkantoran	10.529.118	3.531.547	-	-	-	14.060.665	04 . 00	
01	RM	10.529.118	3.531.547	-	-	-	14.060.665	030	
JUMLAH		10.529.118	4.140.411	-	-	-	14.669.529		

Jakarta, 05 Desember 2017
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409181/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1982-4790-6829-8044

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

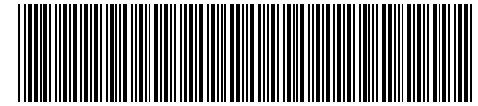
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409181	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.063.106	1.098.730	1.330.556	1.118.524	1.057.065	2.169.825	1.073.312	1.104.095	1.188.807	1.123.680	1.203.715	1.138.114	14.669.529
		51 BELANJA PEGAWAI	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	1.619.866	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	10.529.118
		52 BELANJA BARANG	253.174	288.798	520.624	308.592	247.133	549.959	263.380	294.163	378.875	313.748	393.783	328.182	4.140.411
	013.01.01.1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1.063.106	1.098.730	1.330.556	1.118.524	1.057.065	2.169.825	1.073.312	1.104.095	1.188.807	1.123.680	1.203.715	1.138.114	14.669.529
		51 BELANJA PEGAWAI	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	1.619.866	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	809.932	10.529.118
		52 BELANJA BARANG	253.174	288.798	520.624	308.592	247.133	549.959	263.380	294.163	378.875	313.748	393.783	328.182	4.140.411

Jakarta, 05 Desember 2017
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409181/2018
IV A. B L O K I R**



DS:1982-4790-6829-8044

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409181] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

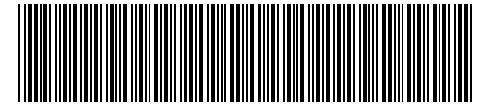
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409181/2018
IV B. C A T A T A N**



DS:1982-4790-6829-8044

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409181] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

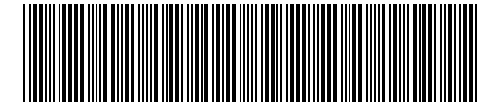
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Sekretaris Jenderal

ttd.
Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP 196012151988021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.409180/2018**



DS:7363-2193-7713-3941

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (409180) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 3.745.000.000 (TIGA MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.07 Program Administrasi Hukum Umum
013.03.07.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 3.745.000.000
Rp. 3.745.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	3.745.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 3.745.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:7363-2193-7713-3941

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409180) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : R NATANEGARA KARTIKA PURNAMA
Bendahara Pengeluaran : ARIF NURYONO TUNGGAL, SH
Pejabat Penanda Tangan SPM : RUSMILAH, SH., MH

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		3.745.000.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		3.745.000.000
2 Program	013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum		3.745.000.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya kualitas layanan administrasi hukum umum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat		
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	6344332 DOKUMEN	
	02	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	35 Dokumen	
	03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa administrasi hukum umum	3,15 INDEKS	
Output Program	01	Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum		
Kegiatan	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		3.745.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah		
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Terselenggaranya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		
	002	Terselenggaranya layanan Balai Harta Peninggalan		
	003	Jumlah Layanan Internal BHP		
	004	terselenggaranya layanan internal (overhead) BHP		
	005	terselenggaranya layanan perkantoran BHP		
Output Kegiatan	5251.006	Pembinaan dan Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	6,00 Dokumen	2.741.580.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	- DOKUMEN	
Output Kegiatan	5251.007	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	12,00 Bulan Layanan	1.003.420.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris	- BULAN LAYANAN	

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

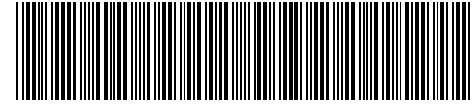
DR. Freddy Harris , S.H, LL.M., A.C.C.S
NIP 196611181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2018

I B. SUMBER DANA



DS:7363-2193-7713-3941

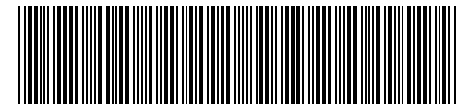
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409180) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2018	Rp.	3.745.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	3.745.000.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7363-2193-7713-3941

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409180) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409180	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	3.745.000	-	-	-	3.745.000		
013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum	-	3.745.000	-	-	-	3.745.000		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	3.745.000	-	-	-	3.745.000		
5251.006	Pembinaan dan Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	-	2.741.580	-	-	-	2.741.580	04 . 00	
04	PNBP	-	2.741.580	-	-	-	2.741.580	030	
5251.007	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	-	1.003.420	-	-	-	1.003.420	04 . 51	
04	PNBP	-	1.003.420	-	-	-	1.003.420	030	
JUMLAH		-	3.745.000	-	-	-	3.745.000		

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
DR. Freddy Harris , S.H, LL.M., A.C.C.S
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7363-2193-7713-3941

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409180) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

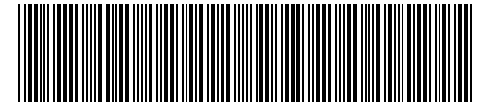
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409180	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	187.250	374.500	374.500	561.750	561.750	374.500	374.500	374.500	374.500	187.250	0	3.745.000
		52 BELANJA BARANG	0	187.250	374.500	374.500	561.750	561.750	374.500	374.500	374.500	374.500	187.250	0	3.745.000
	013.03.07.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	187.250	374.500	374.500	561.750	561.750	374.500	374.500	374.500	374.500	187.250	0	3.745.000
		52 BELANJA BARANG	0	187.250	374.500	374.500	561.750	561.750	374.500	374.500	374.500	374.500	187.250	0	3.745.000

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
DR. Freddy Harris , S.H, LL.M., A.C.C.S
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2018
IV A. B L O K I R**



DS:7363-2193-7713-3941

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409180] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
DR. Freddy Harris , S.H, LL.M., A.C.C.S
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2018
IV B. C A T A T A N**



DS:7363-2193-7713-3941

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409180] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
DR. Freddy Harris , S.H, LL.M., A.C.C.S
NIP 196611181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.409183/2018**



DS:8702-7771-5889-3096

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (06) | DITJEN IMIGRASI |
| 3. Provinsi | : (04) | DI YOGYAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409183) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA |
| Sebesar | : Rp. | 437.000.000 (EMPAT RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.06.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp.	437.000.000
013.06.10.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp.	437.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 437.000.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|--------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN YOGYAKARTA | (030) Rp. | 437.000.000 |
|--------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8702-7771-5889-3096

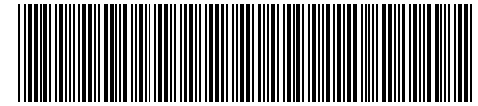
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409183) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : Gunarso
Bendahara Pengeluaran : Arief Nuryono Tunggal
Pejabat Penanda Tangan SPM : Gunarso

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	437.000.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM	437.000.000
2 Program	013.06.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	437.000.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	
	02	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	38400200 layanan
	02	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7.3 indeks
	01	Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	13409 LHK
Output Program	01	Pelayanan Keimigrasian	
Indikator Output Program	01	Jumlah Pelayanan Kegiatan yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	38400200 Layanan
Kegiatan	5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	437.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	
	02	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Bagi WNI	
	03	Terselenggaranya Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	
	04	Pembinaan dan Pengawasan UPT Imigrasi	
	05	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	
	06	Terselenggaranya Layanan Internal Overhead	
	07	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	
	08	Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan Oleh UPT Imigrasi	
	09	Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	
	10	Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang Sesuai Ketentuan	
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Sesuai Ketentuan	
	002	Jumlah Penyidikan Keimigrasian Yang Dilakukan	
	003	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian yang Ditangani Sesuai Ketentuan	
	004	Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Sesuai Ketentuan dari Permohonan yang Masuk	
	005	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8702-7771-5889-3096

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409183) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : Gunarso
Bendahara Pengeluaran : Arief Nuryono Tunggal
Pejabat Penanda Tangan SPM : Gunarso

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	006	Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI yang Sesuai Ketentuan dari Permohonan yang masuk		
	007	Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian		
	008	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI		
	009	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Yang Dilakukan		
	010	Jumlah Layanan Perkantoran		
Output Kegiatan	5254.011	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian	24,00 Kegiatan	437.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	792 Kegiatan	

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Imigrasi

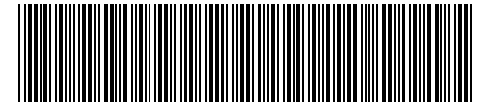
ttd.
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
NIP 196109172015081001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2018

I B. SUMBER DANA



DS:8702-7771-5889-3096

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409183) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

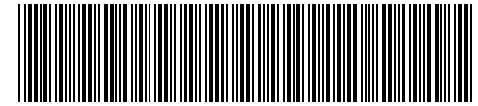
Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2018	Rp.	437.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	437.000.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8702-7771-5889-3096

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409183) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409183	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	437.000	-	-	-	437.000		
013.06.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	-	437.000	-	-	-	437.000		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	437.000	-	-	-	437.000		
5254.011	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian	-	437.000	-	-	-	437.000	04 . 00	
04	PNBP	-	437.000	-	-	-	437.000	030	
JUMLAH		-	437.000	-	-	-	437.000		

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
NIP 196109172015081001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8702-7771-5889-3096

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409183) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

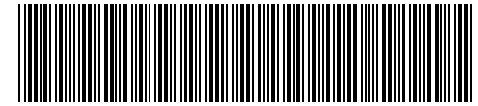
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409183	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.020	8.915	15.645	23.948	25.171	27.968	48.551	47.240	51.216	52.265	58.514	73.547	437.000
		52 BELANJA BARANG	4.020	8.915	15.645	23.948	25.171	27.968	48.551	47.240	51.216	52.265	58.514	73.547	437.000
	013.06.10.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	4.020	8.915	15.645	23.948	25.171	27.968	48.551	47.240	51.216	52.265	58.514	73.547	437.000
		52 BELANJA BARANG	4.020	8.915	15.645	23.948	25.171	27.968	48.551	47.240	51.216	52.265	58.514	73.547	437.000

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
NIP 196109172015081001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2018
IV A. B L O K I R**



DS:8702-7771-5889-3096

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] DITJEN IMIGRASI
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409183] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
NIP 196109172015081001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2018
IV B. C A T A T A N**



DS:8702-7771-5889-3096

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] DITJEN IMIGRASI
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409183] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

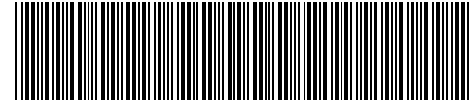
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
NIP 196109172015081001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 013.07.2.409184/2018**



DS:9640-8704-0079-1999

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (409184) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 630.915.000 (ENAM RATUS TIGA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.07.09 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
013.07.09.5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 630.915.000
Rp. 630.915.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 630.915.000 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 630.915.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9640-8704-0079-1999

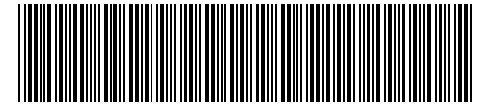
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409184) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : DEWA PUTU GEDE
Bendahara Pengeluaran : ARIF NURYONO TUNGGAL
Pejabat Penanda Tangan SPM : R. NATANEGARA KARTIKA PURNAMA

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		630.915.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		630.915.000
2 Program	013.07.09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual		630.915.000
Sasaran Program	01	Layanan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum		
	02	Penegakan hukum kekayaan intelektual yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas dan pertumbuhan ekonomi nasional		
Indikator Kinerja Program	01	Penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku	50 Persentase	
	02	Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	20 Persentase	
	03	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25 indeks	
	01	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran HKI	75 Persentase	
Output Program	01	Layanan Kekayaan Intelektual		
Indikator Output Program	01	Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	95 %	
	02	Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat	70 %	
	03	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.25 Indeks	
Kegiatan	5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		630.915.000
Sasaran Kegiatan	00	Penyelenggaraan kekayaan intelektual di kantor wilayah		
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Persentase penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di Kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	002	Luas Wilayah Kawasan Berbudaya HKI		
	003	Jumlah permohonan HKI yang diajukan melalui Kanwil		
	004	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil		
	005	Jumlah target KI Komunal yang diinventarisasi		
Output Kegiatan	5253.001	Pelayanan Permohonan HKI di Daerah	600,00 Jumlah Permohonan	483.897.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di Kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	
	02	Jumlah permohonan HKI yang diajukan melalui Kanwil	6444 Permohonan	
	03	Jumlah KI Komunal yang diinventarisasi	33 Data KI Komunal	
	04	Jumlah Indikasi Geografis yang Diawasi	33 Indikasi Geografis	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9640-8704-0079-1999

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409184) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : DEWA PUTU GEDE
Bendahara Pengeluaran : ARIF NURYONO TUNGGAL
Pejabat Penanda Tangan SPM : R. NATANEGARA KARTIKA PURNAMA

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	5253.002	Penegakan Hukum di Daerah	1,00 Jumlah Kasus	147.018.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil	73 Kasus	

Jakarta, 05 Desember 2017
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

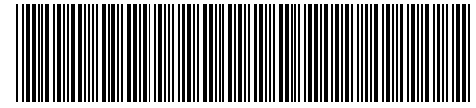
ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2018

I B. SUMBER DANA



DS:9640-8704-0079-1999

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409184) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2018	Rp.	630.915.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	630.915.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9640-8704-0079-1999

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409184) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409184	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	630.915	-	-	-	630.915		
013.07.09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	-	630.915	-	-	-	630.915		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	630.915	-	-	-	630.915		
5253.001	Pelayanan Permohonan HKI di Daerah	-	483.897	-	-	-	483.897	04 . 00	
04	PNBP	-	483.897	-	-	-	483.897	030	
5253.002	Penegakan Hukum di Daerah	-	147.018	-	-	-	147.018	04 . 51	
04	PNBP	-	147.018	-	-	-	147.018	030	
JUMLAH		-	630.915	-	-	-	630.915		

Jakarta, 05 Desember 2017
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9640-8704-0079-1999

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409184) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

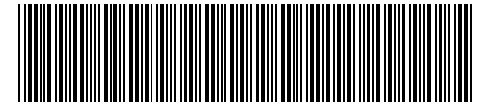
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409184	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.804	12.871	22.587	34.574	36.341	40.379	70.095	68.202	73.943	75.457	84.480	106.182	630.915
		52 BELANJA BARANG	5.804	12.871	22.587	34.574	36.341	40.379	70.095	68.202	73.943	75.457	84.480	106.182	630.915
	013.07.09.5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	5.804	12.871	22.587	34.574	36.341	40.379	70.095	68.202	73.943	75.457	84.480	106.182	630.915
		52 BELANJA BARANG	5.804	12.871	22.587	34.574	36.341	40.379	70.095	68.202	73.943	75.457	84.480	106.182	630.915

Jakarta, 05 Desember 2017
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2018
IV A. B L O K I R**



DS:9640-8704-0079-1999

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409184] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

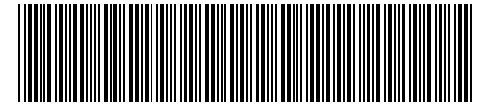
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2018
IV B. C A T A T A N**



DS:9640-8704-0079-1999

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409184] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

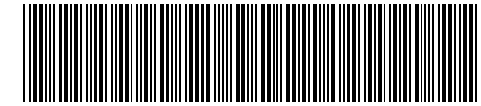
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S.
NIP 196611181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.409185/2018**



DS:0111-0730-0052-8857

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 3. Provinsi | : (04) | DI YOGYAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409185) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA |
| Sebesar | : Rp. | 195.000.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.06	Program Pembentukan Hukum	Rp.	195.000.000
013.08.06.5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Rp.	195.000.000

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	195.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|--------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN YOGYAKARTA | (030) Rp. | 195.000.000 |
|--------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409185/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0111-0730-0052-8857

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409185) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. GUNARSO, Bc.IP.
Bendahara Pengeluaran : Arif Nuryono Tunggal
Pejabat Penanda Tangan SPM : R. Natanegara

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		195.000.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		195.000.000
2 Program	013.08.06	Program Pembentukan Hukum		195.000.000
Sasaran Program	01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas		
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan perencanaan dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)	4 RUU	
	02	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80 %	
	03	Persentase (%) perancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80 %	
Output Program	01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Output Program	01	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disusun sesuai dengan Perencanaan dan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS)	4 RUU	
	02	Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan Sesuai dengan Permohonan	80 %	
	03	Persentase (%) Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi Sesuai Standar	80 %	
Kegiatan	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah		195.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah		
	02	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan		
Indikator Kinerja Kegiatan	001	persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan		
	002	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan		
Output Kegiatan	5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	12,00 Raperda	132.446.000
Indikator Output Kegiatan	01	persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	- -	
Output Kegiatan	5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	12,00 Orang	62.554.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	400 Orang	

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

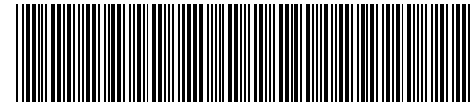
ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : DIPA- 013.08.2.409185/2018

I B. SUMBER DANA



DS:0111-0730-0052-8857

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409185) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2018	Rp.	195.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	195.000.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409185/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0111-0730-0052-8857

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409185) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

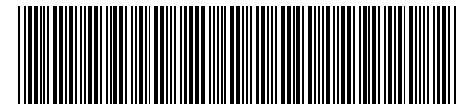
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409185	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	195.000	-	-	-	195.000		
013.08.06	Program Pembentukan Hukum	-	195.000	-	-	-	195.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	-	195.000	-	-	-	195.000		
5250.001	Fasilitas pembentukan produk hukum daerah	-	132.446	-	-	-	132.446	04 . 51	
01	RM	-	132.446	-	-	-	132.446	030	
5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	-	62.554	-	-	-	62.554	04 . 51	
01	RM	-	62.554	-	-	-	62.554	030	
JUMLAH		-	195.000	-	-	-	195.000		

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409185/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0111-0730-0052-8857

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409185) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

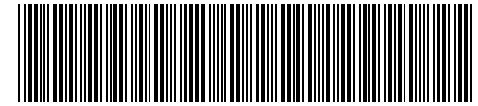
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409185	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.794	3.978	6.981	10.686	11.232	12.480	21.665	21.080	22.854	23.322	26.111	32.817	195.000
		52 BELANJA BARANG	1.794	3.978	6.981	10.686	11.232	12.480	21.665	21.080	22.854	23.322	26.111	32.817	195.000
	013.08.06.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	1.794	3.978	6.981	10.686	11.232	12.480	21.665	21.080	22.854	23.322	26.111	32.817	195.000
		52 BELANJA BARANG	1.794	3.978	6.981	10.686	11.232	12.480	21.665	21.080	22.854	23.322	26.111	32.817	195.000

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409185/2018
IV A. B L O K I R**



DS:0111-0730-0052-8857

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409185] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409185/2018
IV B. C A T A T A N**



DS:0111-0730-0052-8857

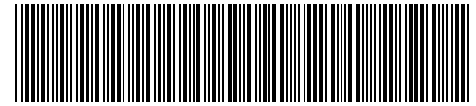
Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409185] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.409186/2018**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (09) | DITJEN HAK ASASI MANUSIA |
| 3. Provinsi | : (04) | DI YOGYAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409186) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA |
| Sebesar | : Rp. | 233.699.000 (DUA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.11 Program Pemajuan HAM
013.09.11.5255 Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	233.699.000
Rp.	233.699.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	233.699.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|--------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN YOGYAKARTA | (030) Rp. | 233.699.000 |
|--------------------|-----------|-------------|

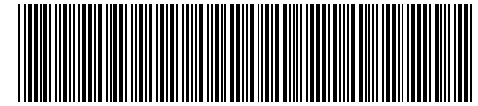
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:1721-9820-2675-6775

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409186) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : Gunarso
Bendahara Pengeluaran : Arif nuryono Tunggal
Pejabat Penanda Tangan SPM : R Natanegara Kartika Purnama

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		233.699.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		233.699.000
2 Program	013.09.11	Program Pemajuan HAM		233.699.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM		
Indikator Kinerja Program	01	Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan program aksi HAM	40 Persen	
	02	Persentase Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan program aksi HAM	20 Persen	
	03	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	50 Kab/Kota	
	04	Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Instansi Terkait	50 Rekomendasi	
Output Program	01	kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM		
Indikator Output Program	01	Jumlah Kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	1 kebijakan	
Kegiatan	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah		233.699.000
Sasaran Kegiatan	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		
	02	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah		
Output Kegiatan	5255.001	Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1,00 Layanan	171.112.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	1 Layanan	
Output Kegiatan	5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	7,00 Pemda	62.587.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi HAM	109 Pemerintah Daerah	
	02	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	57 Kab/Kota	

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

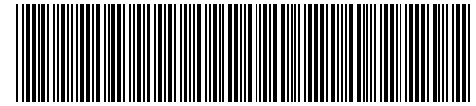
ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2018

I B. SUMBER DANA



DS:1721-9820-2675-6775

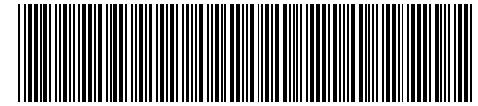
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409186) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2018	Rp.	233.699.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	233.699.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1721-9820-2675-6775

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409186) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409186	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	233.699	-	-	-	233.699		
013.09.11	Program Pemajuan HAM	-	233.699	-	-	-	233.699		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	233.699	-	-	-	233.699		
5255.001	Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	171.112	-	-	-	171.112	04 . 51	
01	RM	-	171.112	-	-	-	171.112	030	
5255.002	Pembangunan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	-	62.587	-	-	-	62.587	04 . 51	
01	RM	-	62.587	-	-	-	62.587	030	
JUMLAH		-	233.699	-	-	-	233.699		

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1721-9820-2675-6775

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409186) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409186	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	11.685	11.685	23.370	23.370	23.370	23.370	46.740	23.370	23.370	23.369	0	0	233.699
		52 BELANJA BARANG	11.685	11.685	23.370	23.370	23.370	23.370	46.740	23.370	23.370	23.369	0	0	233.699
	013.09.11.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	11.685	11.685	23.370	23.370	23.370	23.370	46.740	23.370	23.370	23.369	0	0	233.699
		52 BELANJA BARANG	11.685	11.685	23.370	23.370	23.370	23.370	46.740	23.370	23.370	23.369	0	0	233.699

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2018
IV A. B L O K I R**



DS:1721-9820-2675-6775

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409186] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

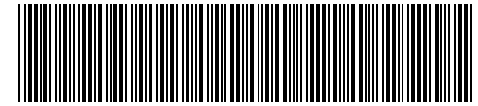
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2018
IV B. C A T A T A N**



DS:1721-9820-2675-6775

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] DITJEN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409186] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

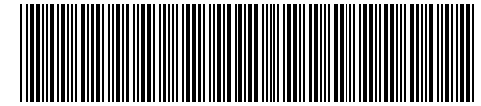
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.409187/2018**



DS:9412-8719-3700-7002

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 3. Provinsi | : (04) | DI YOGYAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409187) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA |
| Sebesar | : Rp. | 2.169.857.000 (DUA MILIAR SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional
013.10.12.5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	2.169.857.000
Rp.	2.169.857.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.169.857.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN YOGYAKARTA | (030) Rp. | 2.169.857.000 |
|--------------------|-----------|---------------|

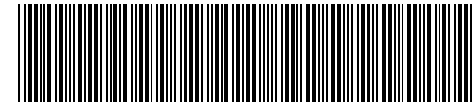
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9412-8719-3700-7002

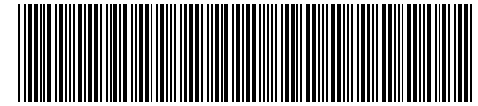
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : R. Natanegara K.P.
Bendahara Pengeluaran : Arif Nuryono Tunggal
Pejabat Penanda Tangan SPM : Rusmilah

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		2.169.857.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		2.169.857.000
2 Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional		2.169.857.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum		
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12 Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20 RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25 JDIH	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Desa/Kelompok/Sekolah Sadar Hu	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500 Orang	
Output Program	01	Pembinaan Hukum Nasional		
Kegiatan	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		2.169.857.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah		
Indikator Kinerja Kegiatan	001	TERSELENGGARANYA KEGIATAN FASILITASI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		
	002	TERSELENGGARANNYA LAYANAN INFORMASI HUKUM MELALUI SISTEM JDIHN		
	003	Jumlah kegiatan penyuluhan hukum di daerah		
	004	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum Non litigasi		
	005	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi		
	006	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin		
	007	Meningkatnya kadar kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya Desa Sadar Hukum		
	008	Terlaksananya pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
Output Kegiatan	5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	178,00 Orang/Kasus	1.424.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	--	
Output Kegiatan	5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	25,00 Kegiatan	266.750.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin	--	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9412-8719-3700-7002

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : R. Natanegara K.P.
Bendahara Pengeluaran : Arif Nuryono Tunggal
Pejabat Penanda Tangan SPM : Rusmilah

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	5256.003	Pengawasan, Verifikasi dan Akreditasi OBH [PN]	1,00 Daerah	24.075.000
Output Kegiatan	5256.004	Penyuluhan Hukum di Daerah	1,00 Daerah	199.070.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	- -	
Output Kegiatan	5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00 Daerah	99.535.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	- -	
Output Kegiatan	5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1,00 Daerah	99.535.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	- -	
Output Kegiatan	5256.007	Pemerataan Layanan Bantuan Hukum Oleh OBH [PN]	1,00 kanwil	56.892.000

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum
NIP 196206271988032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



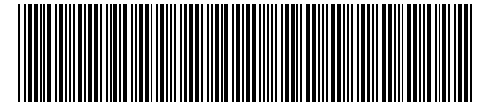
DS:9412-8719-3700-7002

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409187	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	2.159.857	10.000	-	-	2.169.857		
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	-	2.159.857	10.000	-	-	2.169.857		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	2.159.857	10.000	-	-	2.169.857		
5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	-	1.424.000	-	-	-	1.424.000	04 . 51	
01	RM	-	1.424.000	-	-	-	1.424.000	030	
5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	-	266.750	-	-	-	266.750	04 . 51	
01	RM	-	266.750	-	-	-	266.750	030	
5256.003	Pengawasan, Verifikasi dan Akreditasi OBH [PN]	-	24.075	-	-	-	24.075	04 . 51	
01	RM	-	24.075	-	-	-	24.075	030	
5256.004	Penyuluhan Hukum di Daerah	-	199.070	-	-	-	199.070	04 . 51	
01	RM	-	199.070	-	-	-	199.070	030	
5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	-	99.535	-	-	-	99.535	04 . 51	
01	RM	-	99.535	-	-	-	99.535	030	
5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	-	89.535	10.000	-	-	99.535	04 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9412-8719-3700-7002

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	89.535	10.000	-	-	99.535	030	
5256.007	Pemerataan Layanan Bantuan Hukum Oleh OBH [PN]	-	56.892	-	-	-	56.892	04 . 51	
01 RM		-	56.892	-	-	-	56.892	030	
JUMLAH		-	2.159.857	10.000	-	-	2.169.857		

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum
NIP 196206271988032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9412-8719-3700-7002

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

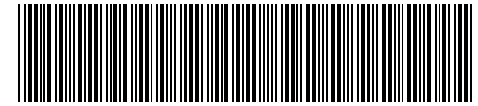
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409187	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	99.535	249.384	226.980	229.517	263.276	176.500	182.060	216.825	180.775	174.560	169.760	685	2.169.857
		52 BELANJA BARANG	99.535	249.384	216.980	229.517	263.276	176.500	182.060	216.825	180.775	174.560	169.760	685	2.159.857
		53 BELANJA MODAL	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	013.10.12.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	99.535	249.384	226.980	229.517	263.276	176.500	182.060	216.825	180.775	174.560	169.760	685	2.169.857
		52 BELANJA BARANG	99.535	249.384	216.980	229.517	263.276	176.500	182.060	216.825	180.775	174.560	169.760	685	2.159.857
		53 BELANJA MODAL	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum
NIP 196206271988032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2018
IV A. B L O K I R**



DS:9412-8719-3700-7002

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409187] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

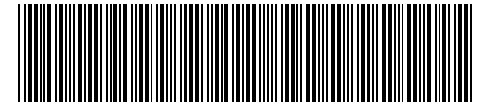
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum
NIP 196206271988032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2018
IV B. C A T A T A N**



DS:9412-8719-3700-7002

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409187] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

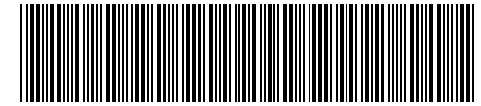
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum
NIP 196206271988032001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.409188/2018**



DS:6207-0751-2078-8306

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (11) | Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| 3. Provinsi | : (04) | DI YOGYAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409188) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA |
| Sebesar | : Rp. | 58.255.000 (LIMA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM
013.11.04.5248 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	58.255.000
Rp.	58.255.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 58.255.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|--------------------|-----------|------------|
| 1. KPPN YOGYAKARTA | (030) Rp. | 58.255.000 |
|--------------------|-----------|------------|

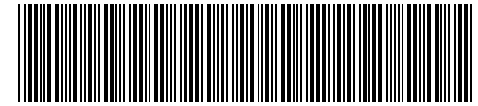
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409188/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:6207-0751-2078-8306

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409188) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : Gunarso
Bendahara Pengeluaran : Arif Nuryono Tunggal
Pejabat Penanda Tangan SPM : R Natanegara Kartika Purnama

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		58.255.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		58.255.000
2 Program	013.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM		58.255.000
Sasaran Program	01	Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia		
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional	20 Rekomendasi	
	02	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	34 Rekomendasi	
Output Program	01	Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		
Indikator Output Program	01	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	54 Rekomendasi	
Kegiatan	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah		58.255.000
Sasaran Kegiatan	01	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		
	02	Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia		
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		
	002	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		
Output Kegiatan	5248.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	3,00 Rekomendasi	58.255.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	33 Rekomendasi	
	02	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	10 Hasil Penelitian	

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Ma'mun, Bc.IP., S.H., M.H
NIP 195712121981011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409188/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6207-0751-2078-8306

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409188) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409188	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	58.255	-	-	-	58.255		
013.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	-	58.255	-	-	-	58.255		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	58.255	-	-	-	58.255		
5248.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	-	58.255	-	-	-	58.255	04 . 51	
01	RM	-	58.255	-	-	-	58.255	030	
JUMLAH		-	58.255	-	-	-	58.255		

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Ma'mun, Bc.IP., S.H., M.H
NIP 195712121981011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409188/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6207-0751-2078-8306

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409188) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409188	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	536	1.188	2.086	3.192	3.355	3.728	6.472	6.297	6.827	6.967	7.800	9.807	58.255
		52 BELANJA BARANG	536	1.188	2.086	3.192	3.355	3.728	6.472	6.297	6.827	6.967	7.800	9.807	58.255
	013.11.04.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	536	1.188	2.086	3.192	3.355	3.728	6.472	6.297	6.827	6.967	7.800	9.807	58.255
		52 BELANJA BARANG	536	1.188	2.086	3.192	3.355	3.728	6.472	6.297	6.827	6.967	7.800	9.807	58.255

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Ma'mun, Bc.IP., S.H., M.H
NIP 195712121981011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409188/2018
IV A. B L O K I R**



DS:6207-0751-2078-8306

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409188] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

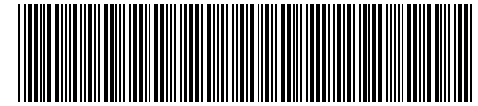
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Ma'mun, Bc.IP., S.H., M.H
NIP 195712121981011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409188/2018
IV B. C A T A T A N**



DS:6207-0751-2078-8306

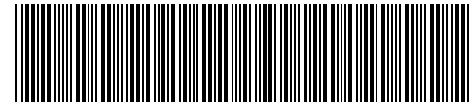
Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409188] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Ma'mun, Bc.IP., S.H., M.H
NIP 195712121981011001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 013.12.2.409189/2018**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (12) | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
| 3. Provinsi | : (04) | DI YOGYAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409189) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA |
| Sebesar | : Rp. | 412.466.000 (EMPAT RATUS DUA BELAS JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.12.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
013.12.05.5249 Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	412.466.000
Rp.	412.466.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 412.466.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|--------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN YOGYAKARTA | (030) Rp. | 412.466.000 |
|--------------------|-----------|-------------|

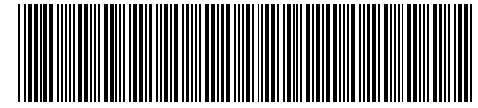
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.12.2.409189/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3007-2903-1846-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409189) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Kuasa Pengguna Anggaran : Gunarso
Bendahara Pengeluaran : Arif Nuryono Tunggal
Pejabat Penanda Tangan SPM : R Natanegara Kartika Purnama

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		412.466.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		412.466.000
2 Program	013.12.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM		412.466.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM		
	02	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan		
	03	Meningkatnya Jumlah Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya di Bidang Hukum dan HAM Yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Terpadu		
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah Aparatur Kementerian Hukum Dan HAM Yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5410 Orang	
	01	Jumlah Lulusan Taruna Akademi Imigrasi dan Taruna Ilmu Pemasarakatan	1276 Orang	
	01	Jumlah Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Terkait Lainnya Yang Telah Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Secara Terpadu	590 Orang	
Output Program	01	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM dan Instansi Teknis Lainnya		
Kegiatan	5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah		412.466.000
Sasaran Kegiatan	01	Penyelenggaraan Diklat Pada Kantor Wilayah		
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah Lulusan Yang Mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi di Kantor Wilayah		
Output Kegiatan	5249.001	Penyelenggaraan Diklat Aparatur Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	70,00 Orang	412.466.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Lulusan Yang Mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi di Kantor Wilayah	1500 Orang	

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala BPSDM Hukum dan HAM

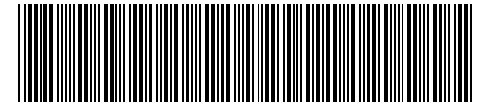
ttd.
Dr. Mardjoeki, Bc. IP., M.Si.
NIP 195907121983031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : DIPA- 013.12.2.409189/2018

I B. SUMBER DANA



DS:3007-2903-1846-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409189) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2018	Rp.	412.466.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	412.466.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.12.2.409189/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3007-2903-1846-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409189) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
409189	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	412.466	-	-	-	412.466		
013.12.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	-	412.466	-	-	-	412.466		
5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	-	412.466	-	-	-	412.466		
5249.001	Penyelenggaraan Diklat Aparatur Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	-	412.466	-	-	-	412.466	04 . 51	
01	RM	-	412.466	-	-	-	412.466	030	
JUMLAH		-	412.466	-	-	-	412.466		

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala BPSDM Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Mardjoeki, Bc. IP., M.Si.
NIP 195907121983031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.12.2.409189/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3007-2903-1846-2500

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409189) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

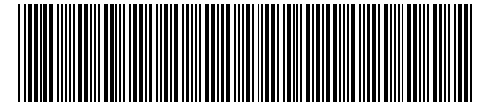
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409189	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	241.768	170.698	0	0	0	0	0	0	0	412.466
		52 BELANJA BARANG	0	0	0	241.768	170.698	0	0	0	0	0	0	0	412.466
013.12.05.5249		Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	0	0	0	241.768	170.698	0	0	0	0	0	0	0	412.466
		52 BELANJA BARANG	0	0	0	241.768	170.698	0	0	0	0	0	0	0	412.466

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala BPSDM Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Mardjoeki, Bc. IP., M.Si.
NIP 195907121983031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.12.2.409189/2018
IV A. B L O K I R**



DS:3007-2903-1846-2500

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [12] BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409189] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

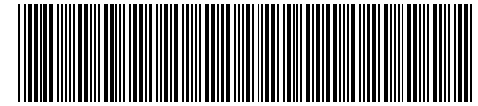
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala BPSDM Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Mardjoeki, Bc. IP., M.Si.
NIP 195907121983031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 013.12.2.409189/2018
IV B. C A T A T A N**



DS:3007-2903-1846-2500

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [12] BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409189] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Kepala BPSDM Hukum dan HAM

ttd.
Dr. Mardjoeki, Bc. IP., M.Si.
NIP 195907121983031002